

## Pemeriksaan pajak hotel dan restoran sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak

Basuki

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=70753&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi andalan bagi PAD DKI Jakarta adalah pajak hotel dan restoran. Pemungutan pajak hotel dan restoran menggunakan sistem self assessment, yang berimplikasi pada perlunya pembenahan aparat perpajakan, sistem dan prosedur, tata kerja, maupun pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem self assessment pada pajak hotel dan restoran juga membutuhkan keandalan administrasi, pengawasan serta penegakan aturan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Hal tersebut karena masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi ketentuan perpajakan dalam menunaikan kewajibannya, seperti melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Karena itu pemeriksaan pajak perlu dilakukan secara terus menerus.

<br />

Penelitian ini bertolak dari dua rumusan permasalahan, yakni pertama, apakah aparat pemeriksa pajak hotel dan restoran telah menjalankan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan kebijakan, dan kedua, apakah fungsi pemeriksaan pajak hotel dan restoran dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur pemeriksaan yang dijalankan aparat pemeriksa dengan kebijakan yang ada serta menganalisis kemampuan fungsi pemeriksaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak.

<br />

Penelitian menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik telaah dokumen untuk menjangkau data sekunder dan wawancara untuk menjangkau data primer. Wawancara dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang pejabat dan pemeriksaan pajak hotel dan restoran, serta 10 (sepuluh) orang wajib pajak hotel dan restoran. Seluruh responden yang diwawancarai bertindak sebagai nara sumber dalam penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

<br />

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan PAD, realisasi APBD maupun persentase kontribusi PAD terhadap APBD di DKI Jakarta memiliki arah kecenderungan yang sama, yakni meningkat selama periode sebelum krisis ekonomi, kemudian menurun cukup signifikan pada masa puncak krisis, lalu meningkat lagi pada periode berikutnya. Sumber-sumber PAD maupun APBD DKI Jakarta dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro.

<br />

Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD DKI Jakarta, sedangkan penerimaan dinas-dinas memberikan kontribusi paling sedikit.

<br />

PAD DKI Jakarta mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap penerimaan dari pajak daerah, sebaliknya upaya menggali sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah, terutama dari retribusi daerah dan BUMD masih kurang. Keuangan daerah DKI sangat tergantung pada kemampuan Dinas

Pendapatan Daerah DKI dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Keberadaan instansi lain lebih berperan sebagai cost center dibandingkan menjadi revenue center.

<br />

Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu pemberi sumbangan terbesar bagi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Penerimaan pajak hotel dan restoran terus menerus meningkat selama lima tahun terakhir. Pemungutan pajak hotel dan restoran menggunakan sistem self assessment maupun official assessment (penetapan). Sistem dan prosedur pemeriksaan pajak hotel dan restoran yang diterapkan oleh Dipenda adalah sesuai dengan Keputusan Kepala Dipenda DKI No. 76 tahun 1995, namun sistem pemeriksaan tersebut tidak atau belum dibakukan menjadi sistem pemeriksaan pajak hotel dan restoran yang baku atau standar.

<br />

Pemeriksaan pajak hotel dan restoran dilakukan melalui berbagai tahapan. Langkah-langkah dan prosedur pemeriksaan dilaksanakan oleh setiap petugas pemeriksa pajak hotel dan restoran dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Aparat pemeriksa pajak menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan kebijakan yang ada. Pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan dengan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pemeriksaan pajak hotel dan restoran masih menghadapi beberapa masalah, seperti belum sempurnanya sistem informasi pajak hotel dan restoran, belum adanya standar atau prosedur baku dalam pemeriksaan pajak, kurangnya jumlah tenaga pemeriksa dan pengawas di lapangan, terdapatnya wajib pajak yang kurang patuh dan tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak, serta kurangnya penegakan hukum. Hal-hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak hotel dan restoran kurang optimal.

<br />

Hasil penelitian merekomendasikan beberapa hal, pertama, penerapan sistem self assessment dan official assessment secara tepat sesuai kondisi wajib pajak. Kedua, Dipenda perlu memiliki data base yang lengkap dan up to date mengenai baik objek maupun subjek pajak hotel dan restoran. Ketiga, perlunya pembakuan sistem dan prosedur pemeriksaan pajak hotel dan restoran. Keempat, perlunya prosedur pemeriksaan pajak hotel dan restoran yang lebih sederhana agar pemeriksaan pajak lebih cepat namun tetap berdasarkan prinsip pemeriksaan. Kelima, perlunya pengawasan ketat, baik( pengawasan administratif maupun lapangan (silent operation) dengan lebih menyempurnakan pelaksanaannya. Keenam, perlunya sistem informasi pajak hotel dan restoran, perlunya pembakuan prosedur pemeriksaan pajak hotel dan restoran, penambahan jumlah tenaga pemeriksa pajak, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang terbukti melalaikan kewajibannya.

<br />